

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Supriyati

STIE Perbanas Surabaya

Email: supriyati@perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya - Indonesia

ABSTRACT

The Directorate General of Taxation has done a strategic role. One of the activities is to increase the tax payer's compliance. This research attempts to see the influence of tax knowledge, tax payer perception of "fiscus" and criterions of tax payer of compliance toward tax payer compliance. The procedure of data collection in this research is by distributing the questionnaires to the tax payers in Tax Services Department of East Sidoarjo directly in 2007. The researchers have collected 43 questioners. The result of validity and reliability from 44 questions shows that all questions are valid and reliable. Accordingly, the result of normality shows that data is in a normal distribution. The result of regression shows that just tax knowledge variable influences significantly the tax payer's compliance. From the result of this research, it is expected that the next researchers and academicians can provide tax knowledge for the students from the low level of education to the higher level of education. The Directorate General of Taxation should also increase their quality of services.

Key words : Tax Knowledge, Taxpayer Perception, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sejak bulan Januari 1984 telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang disebut sebagai reformasi perpajakan secara menyeluruh (Cornelio dan Ignatius, 2004). Pembaharuan pajak ini meliputi pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan perubahan dalam system pemungutan pajak. Latar belakang terjadinya reformasi perpajakan adalah karena undang-undang pajak yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) merupakan peninggalan kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tidak berdasarkan pada Pancasila (Sandy 2000). Tujuan utama reformasi pajak menurut mantan menteri keuangan Republik Indonesia, Radius Prawiro pada sidang DPR tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mencurahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri (Gardina dan

Haryanto, 2006).

Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pemerintahpun telah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak periode tahun 1969-1993 sebesar 149,46 triliun, periode tahun 1994-2000 sebesar 520,65 triliun, dan pada periode tahun 2001-2003 sebesar 778,112 triliun. Selain itu, peningkatan kinerja perpajakan juga dapat dilihat dari hasil tahun 2003 yang mana sumber dana dari sektor pajak mempunyai peranan yang cukup tinggi yaitu mencapai 75% (Abimanyu 2004).

Kenyataan yang ada di Indonesia

besar kegiatan dan usulan yang diproses dalam perencanaan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota sampai terakomodir dalam APBD.

Instrumen dasar dari efisiensi dan efektivitas adalah komitmen politik sedangkan instrumen pendukungnya adalah struktur pemerintahan yang sesuai kepentingan pelayanan masyarakat, adanya standar-standar dan indikator kinerja untuk menilai efektifitas pelayanan, pembukuan keuangan yang memungkinkan diketahuinya satuan biaya, dan adanya survey-survey kepuasan konsumen. Sementara indikatornya adalah meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpanan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan. Dilakukannya swastanisasi dari pelayanan masyarakat.

Penelitian ini belum sampai pada perumusan kriteria tingkat efisiensi (sangat efisien, efisien dan kurang efisien) dengan memperhitungkan semua elemen pada unsur perencanaan (biaya, waktu dan tenaga). Hal itu pada dasarnya dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya, padahal sifat penelitian hendak memberi gambaran yang akurat mengenai kedudukan anggaran terhadap perencanaan. Gambaran tersebut terlihat dari jumlah usulan Musrenbang yang terakomodir dalam APBD dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Oleh karena itu penelitian ini tidak sampai menganalisis secara rinci cakupan setiap nomenklatur anggaran serta dampaknya terhadap pembangunan sektoral dan spasial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode survei, wawancara dan studi dokumentatif. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi survei Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai di tingkat Kota Malang maupun indept interview dari

stakeholder perencanaan dan penganggaran daerah.

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Kota Malang terdiri dari 57 Kelurahan dan 5 Kecamatan dengan total penduduk lebih kurang 800.000 Jiwa dengan luas wilayah 110,06 Km² dan kepadatan penduduk rata-rata setiap Km² adalah 6.948 jiwa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan berdagang.

Untuk penelitian ini, pengumpulan data yang pertama dilakukan melalui survei yang dilakukan di tiap-tiap kelurahan untuk masing-masing kecamatan yang diteliti tidak banyak. Peneliti hanya mengestimasi masing-masing 3 kelurahan untuk tiap-tiap kecamatan dan Kecamatan itu sendiri. Meskipun demikian, dinamika penyelenggaraan antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain yang lainnya lebih kurang bervariasi, sehingga informasi dari kelurahan yang diteliti dianggap memberi gambaran yang terjadi di kelurahan secara keseluruhan begitu pula gambaran di masing-masing kecamatan secara keseluruhan. Sebelum peneliti terjun kelapangan terlebih dahulu peneliti menyusun instrumen survei. Langkah selanjutnya guide survei di sebar di masing-masing stakeholder ditingkat kelurahan dan kecamatan yang berkepentingan terhadap perencanaan dan penganggaran.

Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian reduksi data dilakukan dari data primer baik dari survei dan wawancara maupun data sekunder kemudian dilakukan penyajian data selanjutnya di tarik kesimpulan untuk mendapatkan gambaran efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah. Miles dan Huberman (1992) mempertegas bahwa dalam konteks analisa data tahapan yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan-kesimpulan dari data yang terdiri kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Khusus untuk data sekunder dilakukan dengan analisa isi (contents analysis) namun analisisnya tidak terpisah dari tahapan analisa diatas.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 m di atas permukaan air laut. Kota Malang berhawa sejuk dan kering dengan suhu terendah 140 C sekitar bulan Juli atau Agustus dan suhu tertinggi 32,30 C pada bulan November. Hal ini dikarenakan wilayah Kota Malang dikelilingi oleh beberapa Gunung di antaranya: Gunung Arjuno dan Panderman di sebelah barat, Gunung Semeru dan Bromo di sebelah timur, Gunung Kelud dan Kawi di sebelah barat daya, dan Gunung Anjasmoro dan Welirang di sebelah barat laut. Sedangkan sungai yang mengalir di Kota Malang adalah Sungai Brantas melalui Kec. Blimbing, Klojen dan Lowokwaru, Sungai Amprong melalui Kec. Kedungkandang, Sungai Bromo melalui Kec. Kedungkandang.

Wilayah Kota Malang dibagi dalam 5 kecamatan yaitu: Kedungkandang, Sukun, Blimbing, Lowokwaru, Klojen dan terdiri dari 57 Kelurahan.

Penduduk Kota Malang pada tahun 2006 tercatat sebesar 807,136 jiwa. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,24%. Hampir semua kecamatan memiliki distribusi penduduk yang sama. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar adalah Kec. Lowokwaru sebanyak 190,422 jiwa, disusul kemudian Kec. Kedungkandang sebanyak 177,530 jiwa, Kec. Sukun sebanyak 169,017 jiwa, Kec. Blimbing sebanyak 166,239 jiwa, dan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Kec. Klojen sebanyak 103,928 jiwa.

Gambaran Umum Mekanisme Penyusunan APBD

Tahapan Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana dalam amanat UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka tahapan perencanaan pembangunan dilakukan sama seperti tahap perencanaan lainnya seperti dalam manajemen perencanaan. Tahap ini melalui tahap:

Penyusunan Rencana

1. Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
2. Rancangan Rencana Kerja Departemen / Lembaga SKPD
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
4. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana

1. RPJP Nasional dengan UU dan RPJP Daerah dengan Perda
2. RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
3. RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Evaluasi Kinerja

Tahap Penyusunan dan Penetapan Rencana Program Jangka Panjang (RPJP)

Tahap Penyusunan dan Penetapan Program Jangka Panjang (PJP) sebagaimana yang dimaksud dalam UU 25/2004 disusun dalam jangka waktunya 20 tahun yang memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan.

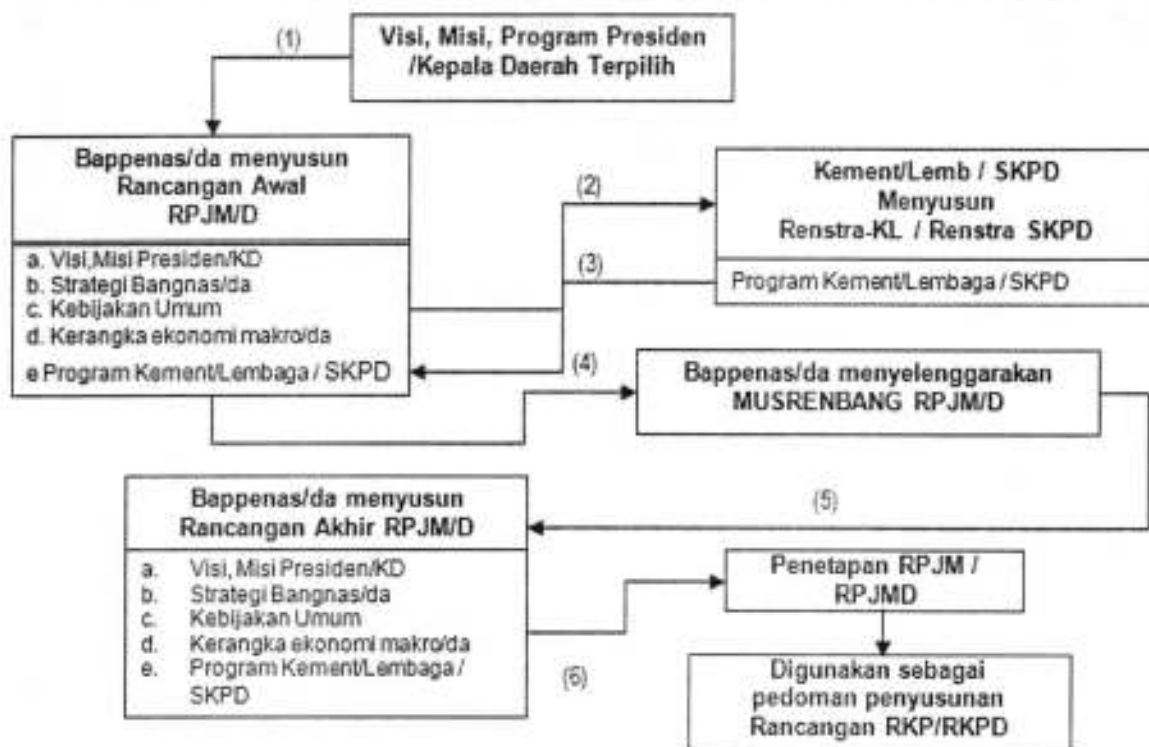
Tahap Penyusunan dan Penetapan Rencanan Program Jangka Menengah (RPJM)

Penyusunan dan Penetapan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui alur/bagan/skema di gambar 1.

Tahap Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Gambar 1
Skema Penyusunan dan Penetapan Rencana Program Jangka Menengah



Sumber: UU. No. 25 Tahun 2004

Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 Lebih lengkap untuk pembagian tugas, kewenangan, mekanisme dan peserta musrenbang dapat dilihat pada lampiran petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang

Sementara untuk perencanaan dan penganggaran daerah dalam satu tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari masing-masing Rencana Kerja Satuan kinerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD) menjadi dasar untuk penyusunan KUA dan SP APBD melalui tahapan Musrenbang. Musrenbang dilakukan beberapa kali yang dimulai pada bulan Januari, Februari, Maret-April yaitu Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang Kota (Forum Sektoral). Pada Bulan Mei dilanjutkan dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD, Bulan Juni menyusun Strategi dan Prioritas, dan pada Bulan Juli-September adalah penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja di masing-

masing unit kerja. Kompilasi dari RASK masing-masing unit kerja yang telah disetujui merupakan draft dari RAPBD yang akan dibahas maupun akan dilakukan hearing pada bulan Oktober-November. Pada Bulan Desember barulah RAPBD tersebut disahkan oleh DPRD menjadi APBD.

Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil survey serta hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa inkonsistensi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Malang, diantaranya:

Pemerintah Kota Malang belum mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Daerah), jangka waktu 20 tahun, yang memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional), RPJP masih dalam proses penyusunan. Artinya proses perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Ma-

lang belum merujuk pada RPJP seperti yang disyaratkan dalam peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang belum mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 tahun, berisi tentang penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. Memuat pula arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencananya RPJM akan disusun tahun 2008 setelah selesainya penyusunan RPJP tahun 2007 ini. Artinya proses perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Malang juga belum merujuk pada RPJM seperti yang disyaratkan dalam peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang mempunyai Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD walaupun belum mempunyai RPJM daerah. RKPD disusun berdasarkan hasil (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Musrenbang) di tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota. Hasil survey di 16 Kelurahan di Kota Malang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan belum efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Malang telah memiliki Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan penjabaran dari RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Merupakan Formulasi kebijakan anggaran (Budget Policy Formulation). Secara umum KUA tidak banyak berubah antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Hal yang sering

menjadi hambatan dalam proses penyusunan KUA adalah selalu molor dari yang dijadwalkan. Seharusnya KUA disusun pada Bulan Juni tetapi pada kenyataannya KUA baru disusun pada bulan Agustus bahkan ada yang baru menyusun Bulan September. KUA disusun bersamaan dengan penyusunan Strategi dan Prioritas Anggaran. Hasil dari proses Musrenbang akan diranking berdasarkan skala prioritas anggaran. Jadi jika terdapat anggaran yang sangat mendesak dalam masyarakat namun tidak menjadi prioritas dalam kebijakan umum anggaran maka tidak akan didanai dalam tahun anggaran tersebut. Hal ini disampaikan oleh beberapa responden yang diwawancara dalam penelitian ini. Terlambatnya proses penyusunan KUA menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam proses penganggaran daerah karena proses selanjutnya juga akan mengalami keterlambatan.

Berdasarkan KUA yang telah disusun maka masing-masing unit kerja akan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bahan penyusunan RAPBD. Setelah draft RAPBD disusun oleh Pihak eksekutif (tim ahli anggaran) dan pihak legislatif (panitia anggaran) maka tahapan selanjutnya akan dilakukan hearing dan jaring asmara.. Tim ahli anggaran terdiri dari Walikota Malang, Sekertaris Daerah, Asisten III, Kepala Bappeda dan Kepala Dispenda, sedangkan panitia anggaran terdiri dari 7 orang yang diambil dari masing-masing komisi. Sebelum RAPBD disahkan maka pihak legislatif akan melakukan hearing dengan pihak eksekutif untuk membahas RKA masing-masing unit kerja. Sementara dari pihak Panitia Anggaran (Panggar) melakukan jaring aspirasi masyarakat (asmara) untuk melakukan cross chek jika terdapat program dan kegiatan yang mendesak tetapi belum dianggarkan dalam APBD. Program dan kegiatan tersebut dapat di masukan dengan menggunakan anggaran setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada Bulan Juli atau Agustus tahun berikutnya. Tahapan berikutnya adalah pengesahan RAPBD menjadi

APBD pada Bulan Desember. Tahap pengesahan juga biasanya mengalami keterlambatan dari jadwal semula yang ditetapkan. Biasanya APBD baru disahkan pada Bulan Januari – Februari Tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan adanya inkonsistensi dalam proses penyusunan anggaran dari segi waktu penyusunannya.

Setelah semua tahapan selesai maka RPJP, RPJM dan APBD dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif.

Efektivitas dan Efisiensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Kota Malang

Untuk menilai apakah proses perencanaan penganggaran daerah di Kota Malang dilakukan survey kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang. Survey dilakukan kepada 5 Camat, 15 Lurah, 15 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), 15 Tokoh Masyarakat (Tomas), TP PKK, RW dan Karangtaruna. Musrenbang kelurahan dihadiri oleh Lurah, LPMK, Tokoh Masyarakat, Ketua RW, TP PKK, dan Karangtaruna. Kemudian perwakilan dari tiap-tiap kelurahan akan mendelegasikan 5 orang untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. Perwakilan dari Kecamatan masing-masing 5 Orang akan didelegasikan untuk mengikuti Musrenbang Kota. Selain dilakukan survey, tahapan berikutnya juga dilakukan wawancara mendalam terhadap key informan terpilih.

Secara umum proses perencanaan penganggaran daerah dikatakan efektif jika sesuai dengan prioritas program yang ditetapkan, tujuan dari dapat tercapai dalam artian tepat waktu dan sesuai dengan yang di syaratkan oleh peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam terhadap 50 masyarakat tentang proses perencanaan penganggaran dapat disimpulkan bahwa banyak terjadi inkonsistensi proses perencanaan. Inkonsistensi tersebut terjadi baik karena tidak lengkapnya peraturan

(produk hukum) yang seharusnya maupun karena ketidaktepatn waktu dalam melakukan proses penganggaran tersebut. Dari 6 tahapan dalam proses perencanaan penganggaran hampir semua terjadi inkonsistensi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan penganggaran di Kota Malang masih belum efektif.

Beberapa kendala yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan Musrenbang diantaranya: a). Waktu pelaksanaannya beberapa kelurahan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundangan. b). Kurangnya sosialisasi pelaksanaan Musrenbang kepada masyarakat. c). Proses Musrenbang lebih karena formalitas kebijakan, artinya substansi dalam pelaksanaan musrenbang masih belum terlihat. d). Kurangnya fasilitas yang dibutuhkan seperti Laptop dan LCD untuk mengefektifkan setiap perubahan prioritas usulan, e). Kurang transparansinya anggaran pelaksanaan Musrenbang kepada masyarakat. f). Musrenbang hanya membahas masalah ekonomi, sosial dan lingkungan saja, padahal banyak masalah lain yang perlu dibahas. g). Minimnya pengetahuan peserta musrenbang tentang perencanaan sehingga proses perencanaan kurang tepat.

Sementara itu proses perencanaan penganggaran daerah dikatakan efisien jika banyak usulan dari Musrenbang yang terakomodir dalam APBD, perencanaan dan penganggaran berjalan secara konsisten dengan tidak terjadi duplikasi kegiatan yang dapat menghamburkan waktu dan biaya. Berdasarkan hasil survey kepada 50 responden rata-rata mengatakan bahwa usulan program dan kegiatan dalam Musrenbang sangat sedikit terakomodir dalam APBD dengan alasan keterbatasan anggaran. Beberapa kendala ketidakefisienan pelaksanaan Musrenbang kelurahan diantaranya: a). Sangat minimnya usulan dari kelurahan yang di akomodir dalam APBD (rata-rata 1 usulan), b). Tingginya ego sektoral masing-masing Ketua RW yang merasa bahwa programnya sangat penting dibanding yang

lain, c). Terdapat selisih anggaran antara yang di usulkan dengan yang terealisasi dalam APBD (anggaran dipotong dari yang di usulkan). d). Lebih banyak usulan fisik yang diutamakan daripada usulan non fisik,

Setelah dilakukan survey kepada responden, tahapan berikutnya peneliti melakukan wawancara terhadap key informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah, FKA, dan juga masyarakat di Kota Malang menyatakan bahwa proses perencanaan penganggaran (Musrenbang Kelurahan) yang terjadi di tingkat Kelurahan kurang efisien dan efektif karena ada beberapa kendala, bahkan ada beberapa kelurahan di Kota Malang yang tidak melakukan mekanisme musrenbang secara benar sesuai mekanisme yang ada. Hal ini seperti terlihat dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Kegiatan musrenbangkel memang sebaiknya diadakan di Bulan Januari atau maksimal Februari, namun karena kendala beberapa hal ada beberapa kelurahan yang jadwalnya Molor bahkan sampe Maret. Kegiatan ini di laksanakan oleh LPMK dan fasilitasi oleh kelurahan biasanya dilaksanakan di balai pertemuan kelurahan. Adapun yang hadir pada waktu pertemuan itu adalah RT/RW, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, LPMK, BKM, dan Unsur Kecamatan.”(BS, 02 Juli 2007)

“Agenda musrenbangkel adalah melakukan pembahasan tentang prioritas usulan oleh masing-masing RT/RW. Prioritas yang disepakati selanjutnya akan ditetapkan menjadi hasil musrenbangkel yang nantinya akan dibawa ke tingkat kecamatan (musrenbangcam). Kalau ada kemolaran waktu di salah satu kelurahan, maka musrenbang kecamatan juga akan molor juga waktunya. Selain menetapkan prioritas, juga menetapkan delegasi yang akan menghadiri kegiatan musrenbangcam yaitu ketua LPMK, Kasi PMK, BKM, PKK, dan perwakilan masyarakat” (Y, 09 Juli 2007)

“Beberapa kendala dalam proses musrenbangkel diantaranya: 1. Sebagian besar masyarakat kurang paham tentang arti pent-

ingnya musrenbangkel, 2. Masyarakat masih banyak yang acuh tak acuh terhadap persoalan masyarakat di tingkat kelurahan. 3. Rendahnya dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang. 4. Terbatasnya dana APBD sehingga usulan masyarakat banyak yang tidak didanai walaupun sudah masuk dalam usulan musrenbang” (KN, 16 Juli 2007)

“Saya disini berbicara sebagai Ketua FKA Kec Blimbing yang insyaallah mengetahui kondisi tiap-tiap LPMK di masing-masing kelurahan. Memang ada beberapa kelurahan yang tidak melakukan mekanisme musrenbang secara benar sesuai aturan (25%). Jadi mereka mengusulkan program-program yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan masyarakat. Mereka kan juga masyarakat jadi ya... wajar saja”.(MW, 19 Agustus 2007)

Sementara itu hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan musrenbang yang dilakukan dengan masyarakat dan FKA menyatakan bahwa dana APBD terbatas sehingga usulan program dan kegiatan dalam Musrenbang tidak semua di danai oleh APBD, yang biasanya usulannya lolos adalah yang dekat dengan kekuasaan. Hasil lain juga menjelaskan adanya overlapping dana dan program sehingga di perlukan koordinasi diantara lembaga yang ada di kelurahan misalnya LPMK dan BKM. Sementara hasil wawancara dengan eksekutif dan legislatif menyebutkan bahwa proses penyusunan APBD syarat dengan nuansa politis. Beberapa hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD itu hanya sekedar formalitas...gak ada partisipasi yang real..., karena faktanya yang terlibat hanya masyarakat tertentu yang dekat dengan pejabat LPMK dan Kelurahan. Banyak masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses Musrenbang padahal dana yang di kucurkan oleh pemerintah sangat banyak, tetapi larinya tidak jelas banyak yang tidak tepat sasaran.....perlu di evaluasi lebih lanjut”(AS, 16 Juli 2007)

“Saya sebagai ketua FKA LPMK selalu

melakukan koordinasi dengan FKA BKM minimal sebulan sekali untuk melakukan sinkronisasi program-program yang telah didanai oleh BKM maupun LPMK sehingga tidak terjadi overlapping program. Bahkan diantara kedua lembaga tersebut saling menunjang misalnya. Ketika ada salah satu RW yang melakukan pembangunan gorong-gorong dengan nilai Rp. 50 juta, sementara dana yang bisa disediakan oleh LPMK hanya Rp. 30 juta, maka sisa dana yang kurang akan di carikan lewat BKM dan swadaya masyarakat. (BS, 20 Juli 2007).

“Setelah proses Musrenbang selesai, maka tahapan berikutnya adalah hearing antara eksekutif dan legislatif. Disinilah, program-program yang diusulkan oleh masyarakat tidak ada yang mengawal lagi sehingga sangat di mungkin kan usulan dari masyarakat terhapus, karena dalam tahapan itu proses politik cenderung mendominasi.....”(MS, 11 Agustus 2007)

“Proses Musrenbang memang tidak dipungkiri kalau kurang efektif....yang menyebabkan usulan masyarakat tidak semuanya sesuai dan di danai lewat APBD... mungkin hanya 25-40% usulan yang didanai lewat Musrenbang. Karena proses selanjutnya dalam tahapan penyusunan APBD adalah hearing antara eksekutif dan legislatif untuk menentukan strategi dan prioritas, disini. masyarakat tidak dapat secara langsung terlibat, namun di wakikan oleh DPRD sebagai wakil rakyat. Disinilah biasanya proses politik cenderung mendominasi dalam penyusunan RAPBD. (WS, 21 Agustus 2007)

“Proses penyusunan APBD di Kota Malang di dominasi oleh politik. Masalahnya adalah adalah proses politiknya seperti apa? Kami dipilih oleh konstituen dari partai kami, tentunya ketika saya mempunyai dana yang akan kami kucurkan kepada masyarakat, saya pasti akan mendahulukan siapa yang memilih saya (konstituen). Saya tidak mungkin memberi dana kepada orang yang tidak memilih saya...itulah salah satu contoh bahwa APBD di dominasi oleh pros-

es politik. Contoh lain...kalau ada dua program yang sama2 menjadi prioritas, mana yang akan di dahulukan..yang pasti yang sudah di rekomendasi oleh dewan...dan masih banyak bargaining politik yang lain.....” (BS, 21 Agustus 2007)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dokumen perencanaan penganggaran daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Kota. Oleh karena itu proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan haruslah betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat, berdasarkan data yang akurat dan peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada efisiensi dan efektifitas perencanaan dalam penganggaran daerah (APBD) di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai konsistensi proses dan hasil perencanaan serta penganggaran di Kota Malang dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan transparan.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil survey serta hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa inkonsistensi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Malang, diantaranya: 1. Pemkot Malang belum mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), artinya proses perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Malang belum merujuk pada RPJP seperti yang disyaratkan dalam peraturan yang ada. 2. Pemkot Malang belum mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) daerah 3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan hasil Musrenbang di tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota. Hasil survey di 16 Kelurahan di Kota Ma-

lang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan belum efektif dan efisien. 4. Proses penyusunan KUA selalu molor dari yang dijadwalkan. KUA disusun bersamaan dengan penyusunan Strategi dan Prioritas Anggaran. 5. Berdasarkan KUA yang telah disusun maka masing-masing unit kerja akan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bahan penyusunan RAPBD. 6. Setelah semua tahapan selesai maka RPJP, RPJM dan APBD dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif.

Secara umum proses perencanaan penganggaran daerah berdasarkan hasil survey kepada 50 responden, hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Malang belum efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena banyak terjadi inkonsistensi proses perencanaan. Inkonsistensi tersebut terjadi baik karena tidak lengkapnya peraturan (produk hukum) yang seharusnya maupun karena ketidaktepatan waktu dalam melakukan proses penganggaran tersebut. Dari 6 tahapan dalam proses perencanaan penganggaran hampir semua terjadi inkonsistensi. Berdasarkan hasil survey kepada 50 responden rata-rata mengatakan bahwa usulan program dan kegiatan dalam Musrenbang sangat sedikit terakomodir dalam APBD dengan alasan keterbatasan anggaran, dalam satu kelurahan rata-rata 1 atau 2 usulan saja yang didanai oleh APBD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa lurah, Forum Komunikasi Anggota (FKA), masyarakat, eksekutif, dan legislatif di Kota Malang menyatakan bahwa proses perencanaan penganggaran daerah kurang efisien dan efektif karena ada beberapa kendala diantaranya: keterbatasan dana APBD, factor kedekatan dengan kekuasaan, overlapping dana dan program, dan proses penyusunan APBD syarat dengan nuansa politis.

Berdasarkan hasil pembahasan, un-

tuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses perencanaan penganggaran daerah peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: (1) Sebaiknya proses pelaksanaan Musrenbang di kawal mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota oleh masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi, (2) Diperlukan sosialisasi tentang Musrenbang kepada masyarakat sehingga pemahaman tentang Musrenbang lebih meningkat, (3) Dibutuhkan fasilitator profesional yang di kontrak untuk memfasilitasi teknik perencanaan penganggaran, (4) Modal penyelenggaraan musrenbang lebih fleksibel (tidak terlalu birokrasi) misalnya dengan adanya forum warga terlebih dahulu, (5) Sebaiknya tidak hanya usulan program fisik yang didanai dalam APBD tetapi program nonfisik yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat juga diakomodir dalam APBD. Sementara bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat merumuskan tentang kriteria tingkat efisiensi (sangat efisien, efisien dan kurang efisien) dengan memperhitungkan semua elemen pada unsur perencanaan (biaya, waktu dan tenaga). Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menganalisis secara rinci cakupan setiap nomenklatur anggaran serta dampaknya terhadap pembangunan sektoral dan spasial.

DAFTAR RUJUKAN

- Bazwir, Revisond, 1999, *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, Edisi Tiga, Jogjakarta BPFE.
- Brannen, Julia, 1997, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Fakultas tarbiah IAIN Antasari Samarinda
- Due, John F 1975, *Keuangan Negara*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Gottdiener, M 1987, *The Decline of Urban Politics: Political Theory and the Crisis of Local State*. California, Sage Publications.

- Kamelus, Deno, Ludwig, Jessica dan Suhirman, 2004, *Rekomendasi Efisiensi dan Efektivitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Studi di Kabupaten Bima, Sumba Timur dan Alor*, PROMIS-NT, GTZ Jerman dan Pemerintah Indonesia.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Jogjakarta, Penerbit Andi.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press.
- Nasir, 1988, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bina Cipta.
- Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Wahyudi, Isa dan Sopanah, 2005, 'Strategi Penguatan Partisipasi Rakyat terhadap Pengawasan dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Malang', *Procesing The 2nd Research Symposium on Economics, The Economy Growth Accelaration and Proverty Reduction*, Surabaya 23-24 November 2005.
- Wahyudi, Isa dan Sopanah, 2005, Strategi Penguatan Masyarakat Sipil dalam meminimalisasi Distorsi penyusunan APBD Kota Malang, *Procesing The 2nd Research Symposium on Economics, The Economy Growth Accelaration and Proverty Reduction*. Surabaya 23-24 November 2005.
- Yuwono, Soni, Indrajaya, TA., dan Hariyadi, 2005, *Penganggaran Sektor Publik*, Malang, Bayumedia dan Pemerintah Kota Dumai.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD)
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Republik Indonesia. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005
- Republik Indonesia. Surat Edaran Bersama

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 1354/M. PPN/03/2004 dan 050/744/SJ tentang

Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah

Variabel independen yang terdiri dari:

- Pengetahuan tentang pajak
- Pengetahuan pajak sebagai salah satu variabelnya merupakan seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.
- Persepsi terhadap petugas pajak
- Persepsi terhadap petugas pajak digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak tentang seberapa besar peran petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
- Persepsi terhadap kriteria wajib pajak.
- Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak tentang kriteria yang ditetapkan untuk menjadi wajib pajak patuh, apakah kriteria yang ditetapkan sudah sesuai ataukah belum sesuai dengan yang diharapkan oleh wajib pajak.

Variabel dependen merupakan variabel yang menyangkut alasan-alasan atau berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak, wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2000 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan KMK No.544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dan penilaian yang digunakan menggunakan rentang yang masing-masing diberikan bobot 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Populasi & Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang berada pada ruang lingkup wilayah KPP Sidoarjo Timur. Peneliti menggunakan "convenience sampling" dari metode nonprobability sampling yaitu setiap anggota populasi yang ada dan yang lokasinya dapat dijangkau oleh peneliti dapat dijadikan sampling.

Data dan Metode Pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari penyebaran kuesioner secara langsung ke responden yang ada di KPP Sidoarjo Timur (tabel 1).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Analisis Deskriptif

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas data digunakan dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor masing-masing variabel. Pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistic Cronbach alpha (α) dari masing-masing instrument dalam suatu variabel.

Uji Statistik

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu pengetahuan wajib pajak, persepsi terhadap petugas pajak, persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh secara parsial terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan wajib pajak, maka digunakan analisis regresi linear dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan Tentang Pajak

X2 = Persepsi Wajib Pajak terhadap Petugas Pajak

X3 = Persepsi Wajib Pajak terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh

e = error atau variabel pengganggu

Gambaran Subyek Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 78 kuesioner kepada wajib pajak badan di KPP Sidoarjo timur, yang telah sesuai dengan kriteria penelitian. Dari 78 kuesioner yang telah didistribusikan langsung oleh peneliti di perusahaan-perusahaan yang ada di KPP Sidoarjo Timur, sejumlah 43 (55,13%) total kuesioner yang kembali dan terjawab dengan lengkap. Selebihnya yaitu 35 kuesioner (44,87%) tidak kembali kepada peneliti. Adapun deskripsi respon-

Tabel 1
Kisi-Kisi Variabel Kuesioner Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	Uraian
<u>Bagian I:</u> Identitas Responden	Jumlah Karyawan: Bidang Usaha: Bentuk Usaha:
<u>Bagian II:</u> Tanggapan Responden: A. Pengetahuan tentang pajak	Pajak dipungut berdasarkan UU Pajak berguna bagi masyarakat Tidak dapat imbalan langsung Adanya sanksi perpajakan Pemungutan pajak oleh pemerintah Self assessment system Kepemilikan NPWP Kepemilikan NPPKP Penyampaian SPT Masa & Tahunan Permohonan Penundaan Manfaat wajib pajak patuh
B. Persepsi terhadap petugas pajak	Kooperatif Menegakkan aturan perpajakan Bekerja secara jujur Mempersulit wajib pajak Pernah dikecewakan Informasi belum cukup baik Pelayanan cukup baik Bersikap adil Pemenuhan kewajiban pajak
C. Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh	Telah membayar pajak Tepat waktu penyampaian SPT Permohonan penundaan Laporan keuangan auditan Pelaksanaan pembukuan perush. Proses pemeriksaan pajak Kriteria WP Patuh terlalu berat
D. Kepatuhan Wajib Pajak	Tepat waktu penyampaian SPT Kebenaran perhitungan pajak Tepat waktu membayar pajak Tidak memiliki tunggakan pajak Tidak melanggar peraturan perpajakan Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana Hasil Audit Laporan Keuangan Pembukuan sesuai perpajakan

den tampak di table 1.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada 18 (41,86%) wajib pajak badan yang menjadi responden memiliki karyawan sebanyak kurang dari 10 orang. Responden lebih menunjukkan sebagai badan usaha yang tidak terlalu besar atau tergolong perusahaan berskala kecil.

Tabel 3 menunjukkan bahwa badan usaha yang menjadi responden penelitian sebagian besar memiliki bidang usaha jasa,

khususnya pada jasa iklan dan agen perjalanan.

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (95,35%) memiliki badan usaha berbentuk perseroan, walaupun perusahaan yang mereka miliki masih tergolong perusahaan berskala kecil.

Tabel 5 menunjukkan bahwa sumber informasi perpajakan yang didapat wajib pajak yang menjadi responden cukup variatif artinya mereka telah memperoleh informasi

Tabel 2
Berdasarkan Jumlah Karyawan

NO	JUMLAH KARYAWAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	< 10 Orang	18	41,86%
2	10 – 50 Orang	10	23,26%
3	50 – 99 Orang	1	2,33%
4	> 100 Orang	14	32,56%
Jumlah		43	100%

Sumber : Data Primer

Tabel 3
Berdasarkan Bidang Usaha

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jasa	30	69,77%
2	Dagang	1	2,33%
3	Industri	12	27,9%
Jumlah		43	100%

Sumber : Data Primer

Tabel 4
Berdasarkan Bentuk Usaha

NO	BENTUK USAHA	JUMLAH	PERSENTASE
1	PT	41	95,35%
2	CV	1	2,33%
3	UD	1	2,33%
Jumlah		43	100%

Sumber : Data Primer

Tabel 5
Sumber Informasi Perpajakan

NO	SUMBER INFORMASI	JUMLAH	TOTAL RESPONDEN	PROSENTASE
1	Radio	4	43	9,3%
2	Televisi	10	43	23,3%
3	Majalah Pajak	9	43	20,9%
4	Surat Kabar	15	43	34,9%
5	Internet	16	43	37,2%
6	Petugas Pajak	32	43	74,4%
7	Buku Perpajakan	4	43	9,3%
8	Konsultan Pajak	4	43	9,3%
9	Seminar Pajak	10	43	23,3%
10	Pelatihan Pajak	10	43	23,3%

Sumber : Data Primer

dari berbagai sumber. Tetapi, yang terbanyak informasi tersebut diperoleh dari petugas pajak, artinya keterlibatan petugas pajak dalam aktivitas perpajakan perusahaan masih cukup besar.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menunjukkan sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam fungsinya melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan terhadap 42 (empat puluh dua) item pernyataan yang meliputi 13 (tiga belas) item pernyataan untuk mengukur pengetahuan pajak, 10 (sepuluh) item pernyataan untuk mengu-

kur persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak, 10 (sepuluh) item pernyataan untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh dan 9 (sembilan) item pernyataan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) item pernyataan secara keseluruhan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji keandalan alat ukur yang digunakan. Dalam pengujian ini menggunakan alat uji statistik Cronbach Alpha (α), dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel, jika

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Adapun hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa secara keseluruhan alat ukur tersebut dapat diandalkan..

Uji Normalitas

Hasil analisis statistik one-sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai signifikansinya di atas 0,05 sehingga H_0 dinyatakan tidak dapat ditolak artinya model regresi ini memiliki distribusi normal.

Pengujian Statistik

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0.000 yang berarti bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan hasil uji t tampak di bawah ini.

Hasil pengujian statistik di atas menunjukkan bahwa tidak semua faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,016 yang menyatakan bahwa H_0 ditolak atau variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pengaruh variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh menunjukkan tingkat signifikansinya masing-masing sebesar 0,828 dan 0,459 yang menyatakan H_0 diterima atau kedua variabel independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil pengujian statistik terlihat bahwa

variabel pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gardina dan Haryanto (2006), yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengetahuan tentang pajak antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Kenyataan yang ada menunjukkan saat ini banyak wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak cukup memadai. Pengetahuan pajak mereka didapat dari berbagai sumber informasi. Salah satu sumber informasi perpajakan terbanyak yang didapat oleh setiap wajib pajak berasal dari petugas pajak. Selain dari petugas pajak, pengetahuan wajib pajak ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak.

Pengetahuan perpajakan yang cukup memadai ini tentunya mempermudah mereka memenuhi kewajiban perpajakan, apalagi pengetahuan perpajakan mereka dapat diandalkan karena sebagian besar berasal dari petugas pajak. Artinya, dengan bekal pengetahuan yang mereka miliki akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain pihak DJP pun pada tahun-tahun terakhir ini telah menggalakkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka sebagai upaya untuk menjangkau wajib pajak, baik melalui sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Langkah yang ditempuh pihak DJP ini tentunya diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Bertambahnya pengetahuan wajib

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,904	1,114		,812	,422
	A	,523	,208	,395	2,510	,016
	B	6,991E-02	,320	,040	,218	,828
	C	,232	,310	,149	,747	,459

Sumber : Hasil Pengolahan Data

pajak tentunya mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara dan kesadaran pajak yang meningkat juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh persepsi tentang petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar wajib pajak (74,4%) masih memperoleh informasi mengenai pajak dari petugas pajak, selain dari surat kabar, televisi dan internet. Wajib pajak yang dijadikan responden berada pada satu KPP yang sama sehingga mereka memperoleh informasi dan pelayanan yang sama dari petugas pajak karena petugas pajak berasal dari satu instansi yang sama. Bila informasi yang diberikan petugas pajak dan pelayanan yang diterima wajib pajak cenderung sama akan mengakibatkan wajib pajak memiliki persamaan pandangan terhadap petugas pajak.

Berdasarkan jawaban responden juga menunjukkan bahwa wajib pajak banyak yang menginginkan adanya petugas pajak yang mampu menegakkan peraturan perpajakan, bersikap jujur, dan tidak menyulitkan wajib pajak serta mampu memberikan informasi yang tepat. Kenyataan yang ada selama ini wajib pajak memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dengan waktu sebelumnya, artinya pelayanan petugas pajak belum mampu meningkatkan kemandirian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat ketergantungan pada petugas pajak masih cukup besar sehingga persepsi wajib pajak atas pelayanan petugas pajak pun sama. Persepsi atas petugas pajak yang cenderung sama atau tetap, tentunya tidak mengubah kesadaran wajib pajak ataupun mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa bila ada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebenarnya bukan disebabkan adanya pengaruh persepsi atas petugas pajak, melainkan karena faktor lain

seperti frekuensi sosialisasi DJP, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat kerumitan peraturan perpajakan.

Pengaruh persepsi tentang kriteria wajib pajak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian statistik ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gardina dan Haryanto (2006). Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa banyak wajib pajak masih menganggap kriteria wajib pajak patuh ini terlalu sulit dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Untuk menjadi wajib pajak patuh tidak mudah dilakukan, namun wajib pajak hanya diberikan manfaat berupa kemudahan dalam restitusi. Hal ini dirasa tidak sebanding dengan upaya yang mereka lakukan. Apalagi bila terjadi perubahan peraturan perpajakan, menjadikan kriteria wajib pajak patuh menjadi demikian sulit.

Adanya persepsi yang tidak berubah akan kriteria wajib pajak patuh menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak berupaya meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakannya atau berupaya meningkatkan kepatuhannya. Peneliti melihat kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi DJP tentang hal ini, rendahnya pemahaman mereka tentang kriteria wajib pajak, juga di KPP Sidoarjo ini masih banyak wajib pajak yang tidak patuh. Karena itu penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya disebabkan karena persepsi wajib pajak saja, tetapi karena faktor lain seperti frekuensi sosialisasi DJP, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat kerumitan peraturan perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak, persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada wajib pajak badan di wilayah KPP Sidoarjo timur dan yang telah menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 43 responden.

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. Kenyataan lain menunjukkan pelayanan petugas pajak ataupun kriteria tentang wajib pajak patuh dinilai wajib pajak belum mengalami perubahan dan ini tentunya belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya disebabkan karena bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak saja, melainkan disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Ada variabel lain yang juga dimungkinkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tingkat frekuensi sosialisasi DJP dan tingkat kerumitan peraturan perpajakan.

Untuk memperbaiki hasil penelitian kali ini atas dasar kelemahan dan keterbatasan yang ada, peneliti dapat memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan pada KPP Sidoarjo timur saja, diharapkan penelitian mendatang dapat diperluas. Bagi pihak DJP dapat dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan mulai dari proses sosialisasi, pengkajian lagi peraturan perpajakan yang ada, dan perbaikan kinerja petugas pajak agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abimanyu, Anggito, 2004, *Wajib Pajak Belum Patuh*, diakses tanggal 21 september 2006, < <http://fiscal.depkeu.go.id/pernik.html> >
- Bohari, 1999, *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Diadit Media, Jakarta
- Budiono, Eko, 2003, *Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo.
- Gardina, Trisia dan Haryanto, Dedy, 2006, *'Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak'*, Modus, Vol.18 (1), hal. 10-28
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/KMK.03/2003 Tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh.
- Kiryanto, 1999, *'Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya'*, Simposium Nasional Akuntansi II IAI-KAPd. Gedung Widyaloka universitas Brawijaya 24-25 September 1999
- Samaji, Iji, 2007, *Pengaruh Tingkat Kepuasan Kerja Terhadap Kepatuhan PKP Kabupaten Sidoarjo*, Tesis Program Pascasarjana UNAIR (Tidak dipublikasikan).
- Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi